ABSTRAK

Skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Penundaan Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Sampai Melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu**" ini adalah hasil penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan mengapa ada peraturan mengenai penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan anaknya di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap peraturan mengenai penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitik.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa munculnya peraturan mengenai penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu disebabkan maraknya fenomena hamil di luar nikah yang diketahui pada saat pasangan suami istri tersebut melakukan legalisir akta kelahiran untuk anaknya, tenggang waktu perkawinan dengan kelahiran anaknya begitu singkat. Dengan adanya peraturan mengenai penundaan perkawinan yang dikeluarkan oleh Paguyuban Pembantu Penghulu diharapkan bisa meminimalisir angka hamil di luar nikah dikemudian harinya.

Analisis hukum Islam terhadap peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu menyimpulkan bahwa hal tersebut hingga saat ini masih merupakan hal yang kontroversial, berangkat dari dalil al-Qur'an Surat *an-Nūr* ayat 3 dan Hadits Nabi saw. juga beberapa pendapat Imam Mazhab, KHI pasal 53 ayat (1) dan (2) dan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-maṣālih* (menolak *kemaḍaratan* lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Meskipun hal ini merupakan bentuk preventif terhadap maraknya perzinahan di Kecamatan Junrejo Kota Batu, hal itu tidak bisa menutup kemungkinan adanya pasangan remaja yang sudah kadung kebobolan hamil di luar nikah, jika mereka tidak segera dinikahnkan, akan ada *maḍarat* yang lebih besar baginya dan bagi anak yang akan lahir beberapa waktu setelahnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran bahwa kebijakan Pejabat Pembantu Penghulu (modin) KUA Kecamatan Junrejo tersebut merupakan hal yang kontroversi. Peraturan tersebut mengandung *maslaḥat* dan *maḍarat* yang saling beriringan, namun yang perlu diperhatikan ialah akan ada pihak yang sangat dirugikan jika tidak dilaksanakan perkawinan keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id